

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Agusmidah dkk, 2012, *Bab-bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kartasapoetra G dan Kartasapoetra R.G dkk, 1988, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe, 2000, *Internasional Labour Office Geneva: Penetapan Upah Minimum (Minimum Wage Fixing)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2006, *Aspek Hukum Pengupahan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Margono, S. 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 121.
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supriyanto, Hari V, 2013, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sutedi, Andrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Syafaat, Rachmad, 2008, *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya*, TRANS Publishing, Malang.

Uwiyono, Aloysius, dkk, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

YLBHI, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Kebutuhan Hidup Layak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Upah Minimum.

Keputusan Gubernur Nomor 235/KEP/2016 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.

B. Karya Ilmiah

Ramses Harry Doan Sinaga, 2017, "Implementasi kebijakan Upah Minimum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Istikomah, 2016, "Formula Pengupahan PP No. 78 Tahun 2015 dalam Perspektif UUD 1945 dan Hukum Islam", *Tesis*, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Budiyono, 2007, "Penetapan Upah Minimum dalam kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi Pekerja/Buruh dan perkembangan Perusahaan", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

C. Jurnal

Devanto Shasta Pratomo dan Putu Mahardika Adi Saputra. 2011, Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan : Tinjauan UUD 1945, *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2011.

Ig. Sigit Murwito, dkk, "Instrumen Non-Upah sebagai Komplemen Upaya Peningkatan Kesejahteraan Buruh: Potret Lemahnya Komitmen Kebijakan Pemerintah Daerah", *KPPOD*, Mei 2013.

Mugi Harsono & Agus Ambarepto, 2006, Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Harmonisasi Hubungan Kemitraan Atara Pekerja dan Pengusaha, *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* Vol. 1 No. 1 Desember 2006.

Pitaya, "Dilematika Penetapan Upah Minimum", *Mimbar Hukum* Volume 18, Nomor 2, Juni 2006.

Sulistiowati, “Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara Investor Asing dengan Pekerja Indonesia”, *Mimbar Hukum* Volume 27, Nomor 2, Juli 2015.

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Balai Pustaka, Jakarta

E. Internet

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_210427.pdf

Shanto, “Menggugat (Lagi) PP No 78 Tahun 2015”, <http://spn.or.id/menggugat-lagi-pp-no-78-tahun-2015/>

Tri Wahyu Widodo, “Dampak Penerapan PP. 78 Tahun 2015 dan Alternatif Pengupahan bagi Pekerja/buruh”, <http://turc.or.id/home/wp-content/uploads/2017/03/Lembur-November-2016.pdf>

Robert Libra, “Azas Keadilan dalam penentuan upah minimum di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan”, https://www.researchgate.net/publication/296488651_Azas_keadilan_Penentuan_Upah_Minimum

Kompas, “Pengertian Upah Minimum”, <http://www.kompasiana.com>

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP.GSBI), “PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; Skema Baru Politik Upah Murah Pemerintah Jokowi-JK”, <http://www.infogsbi.org/2015/10/pp-no-782015-tentang-pengupahan-skema.html>

Samrut Lellolsima, “Permenaker tentang skala upah masih setengah hati”, <http://ekbis.rmol.co/read/2017/03/23/285061/Permenaker-Tentang-Skala-Upah-Masih-Setengah-Hati->

Sunardi, “Guru Besar Hukum UGM: PP Pengupahan No. 78/2015 Inkonsistituonal”, <https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/guru-besar-hukum-ugm-pp-pengupahan-no-782015-inkonstitusional/>

Ali Mutosawifin, “Problematika di Balik Upah Minimum”, <https://seword.com/ekonomi/problema-di-balik-upah-minimum/>

Hukum Online, “Dari 34 Provinsi, hanya 30 yang Menetapkan UMP sesuai PP Pengupahan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt583d704a52211/dari-34-provinsi--hanya-30-yang-menetapkan-ump--sesuai-pp-pengupahan>,